

COVER DEPAN

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
LAPORAN OPERASIONAL	vi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	vii
NERACA.....	viii
CATATAN ATASAN LAPORAN KEUANGAN	ix
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR	
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan	18
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	19
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	25
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	25
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	37
BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI.....	38
4.1 Entitas Akuntansi	38
4.2 Basis Akuntansi	38
4.3 Basis Pengukuran	38
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	38
4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi	39
4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan.....	39
4.4.2.1 Pendapatan – LRA.....	39
4.4.2.2 Belanja.....	40
4.4.2.3 Pendapatan - LO	41
4.4.2.4 Beban.....	41
4.4.2.5 Aset.....	42
4.4.2.6 Kewajiban.....	46

4.4.2.7 Ekuitas	46
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	48
5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD.....	48
5.1.1 Pendapatan.....	48
5.1.2 Belanja	48
5.1.2.1 Belanja Operasi	49
5.1.2.2 Belanja Modal	52
5.1.3 Pendapatan LO	54
5.1.4 Beban LO.....	54
5.1.4.1 Beban Operasi	55
5.1.4.1.1 Beban Pegawai	55
5.1.4.1.2 Beban Persediaan.....	55
5.1.4.1.3 Beban Jasa	55
5.1.4.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	55
5.1.4.1.7 Beban Penyisihan Piutang	55
5.1.5 Aset.....	56
5.1.5.1 Aset Lancar.....	57
5.1.5.1.9 Persediaan.....	57
5.1.5.2 Aset Non lancar	57
5.1.5.2.1 Aset Tetap.....	57
5.1.5.2.1.1 Tanah	58
5.1.5.2.1.2 Peralatan dan Mesin	58
5.1.5.2.1.3 Gedung dan Bangunan	59
5.1.5.2.1.5 Aset Tetap Lainnya.....	60
5.1.5.2.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	60
5.1.5.2.1.7 Akumulasi Penyusutan	60
5.1.5.2.2 Aset Lainnya.....	60
5.1.6 Kewajiban.....	60
5.1.6.3 Utang Beban	61
5.1.7 Ekuitas	61
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	62
6.1 Domisili dan Struktur Organisasi	62
6.2 Tugas dan Fungsi.....	63
6.3 Sumber Daya Manusia	64
BAB VII PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Table 1 Alokasi Anggaran Tahun 2025.....	6
Table 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	19
Table 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 dan 2024.....	49
Table 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024	50
Table 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024.....	50
Table 6 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024.....	51
Table 7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024	52
Table 8 Realisasi Beban LO Tahun 2025 dan 2024.....	54
Table 9 Perbandingan Aset Tahun 2025 dan 2024.....	56
Table 8 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap.....	58

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATASAN LAPORAN KEUANGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, Januari 2026
Pengguna Anggaran

Dr. M. Ir. H. Fitriansyah, ST.,M.M
NIP. 19740626 200701 2 027

BAB I PENDAHULUAN

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilindungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2024 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasioanl).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2 Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/18742/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Awal Tahun Anggaran 2024 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
 16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.4.1/27796-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Awal Tahun Anggaran 2026 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,28. Tingkat inflasi ini melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya sebesar 1,87. Tingginya tingkat inflasi ini tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya pergeseran APBD. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 7.390.510.856,- dari anggaran murninya yaitu sebesar 35.215.708.265,-, pergeseran anggaran belanja sebesar 21%. Melalui pergeseran anggaran ini diharapkan melalui keterbatasan anggaran yang ada, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap diberikan secara maksimum. Adapun pergeseran anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Table 1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Kode Progr am	Kode Kejiata n	Kode Sub Kejiat an	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.247.312	-		365.247.312
01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287.764.000			287.764.000
01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.799.828			4.799.828
01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.799.828			4.799.828
01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.941.828			3.941.828
01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.941.828			3.941.828
01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.192.000			53.192.000
01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.808.000			6.808.000

02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.667.569.862			13.667.569.862
02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.415.336.438			13.415.336.438
02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.040.000			242.040.000
02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	723.000			723.000
02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	579.500			579.500
02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.894.000			3.894.000
02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.996.924			4.996.924
03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.710.000			8.710.000
03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.000			2.600.000
03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.000			2.600.000
03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan	910.000			910.000

			Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.600.000		2.600.000
05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.180.000		113.180.000
05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.180.000		11.180.000
05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000		90.000.000
05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000		12.000.000
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.048.213.151		2.048.213.151
06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.528.741		41.528.741
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	767.100.088		767.100.088
06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.122.881		63.122.881
06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.080.750		81.080.750
06	05		Penyediaan Barang	29.333.500		29.333.500

			Cetakan dan Pengandaan			
06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	100.000.000		100.000.000
06	09		Penyelenggaraan Rapat Koori dan Konsultasi SKPD	934.647.191		934.647.191
06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.400.000		31.400.000
07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.749.714		54.749.714
07	05		Pengadaan Mebel	25.143.840		25.143.840
07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.874		5.874
07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.600.000		2.600.000
08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.412.803.369		3.412.803.369
08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000		15.000.000
08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	561.629.205		561.629.205
08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.412.800		390.412.800
08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2.445.761.364		2.445.761.364

			Kantor				
09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.366.998			688.366.998
09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.087.998			152.087.998
09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	198.655.000			198.655.000
09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.302.000			49.302.000
09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	44.400.000			44.400.000
09	09		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.772.000			233.772.000
09	10		Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000			10.150.000
2.1.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang	1.253.212.894			1.253.212.894

			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
2.1.01	01		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	293.091.020		293.091.020
2.1.01	02		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	393.286.520		393.286.520
2.1.01	04		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	129.077.020		129.077.020
2.1.01	05		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	148.307.020		148.307.020
2.1.01	11		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	173.209.020		173.209.020
2.1.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	63.153.274		63.153.274

2.1.01	13		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	53.089.020			53.089.020
2.1.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.103.393.770			1.103.393.770
2.1.02	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	237.372.120			237.372.120
2.1.02	02		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	186.218.000			186.218.000
2.1.02	03		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	171.642.000			171.642.000
2.1.02	06		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	162.068.000			162.068.000
2.1.02	09		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	185.787.650			185.787.650
2.1.02	10		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	160.306.000			160.306.000
2.1.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.915.068.670			2.915.068.670
2.1.03	01		Penelitian dan Pengembangan	196.306.590			196.306.590

			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2.1.03	02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	171.178.134		171.178.134
2.1.03	03		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	135.400.412		135.400.412
2.1.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	212.615.877		212.615.877
2.1.03	05		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	273.000.020		273.000.020
2.1.03	06		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	153.351.619		153.351.619
2.1.03	07		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	736.328.302		736.328.302
2.1.03	08		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	144.151.506		144.151.506
2.1.03	09		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	211.391.805		211.391.805
2.1.03	10		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	209.087.835		209.087.835
2.1.03	11		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.611.820		197.611.820
2.1.03	12		Penelitian dan	191.571.920		191.571.920

			Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			
2.1.03	13		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	83.072.830		83.072.830
2.1.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2.194.681.669		2.194.681.669
2.1.04	01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	813.569.328		813.569.328
2.1.04	02		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	190.966.044		190.966.044
2.1.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	897.995.959		897.995.959
2.1.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	197.678.020		197.678.020
2.1.04	05		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	94.472.318		94.472.318

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Permendagri yang semula didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90

Tahun 2019. Pada tahun 2025 BALITBANGDA memiliki 12 program dan 73 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi

- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
11. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
- Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

12. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2025.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamankan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah

sebesar Rp. 25.126.822.801,- nilai ini tidak mencapai target sebesar Rp. 27.825.197.409,- atau sebesar 90,21%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi Penurunan sebesar Rp.1.296.499.288,- atau sebesar 9,5% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp. 26.423.322.089,-. Adapun penjelasan atas kenaikan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Table 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.247.312	80%
01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287.764.000	10 Dokumen
01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.799.828	1 Dokumen
01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.799.828	1 Dokumen
01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.941.828	1 Dokumen
01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.941.828	1 Dokumen
01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.192.000	21 Laporan
01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.808.000	5 Laporan
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.667.569.862	4,70 %
02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.415.336.438	70 Orang /Bulan
02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.040.000	12 Dokumen

02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	723.000	1 Dokumen
02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	579.500	1 Dokumen
02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.894.000	1 Dokumen
02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.996.924	30 Laporan
03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.710.000	84,64 %
03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.000	1 Dokumen
03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.000	1 Dokumen
03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	910.000	12 Laporan
03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.600.000	12 Laporan
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.180.000	73,53%
05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.180.000	1 Dokumen
05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000	15 Orang
05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	30 Orang
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.048.213.151	76%
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.528.741	1 Paket
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	767.100.088	1 Paket
06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.122.881	1 Paket
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.080.750	1 Paket
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.333.500	1 Paket
06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	1 Laporan
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koori dan Konsultasi SKPD	934.647.191	12 Laporan
06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	31.400.000	1 Dokumen

		SKPD		
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.749.714	3,04%
07	05	Pengadaan Mebel	25.143.840	1 Paket
07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.874	10 Unit
07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.600.000	1 Unit
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.412.803.369	85,78 %
08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	12 Laporan
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	561.629.205	12 Laporan
08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.412.800	12 Laporan
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.445.761.364	35 Laporan
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.366.998	10,51 %
09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.087.998	5 Unit
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	198.655.000	9 Unit
09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.302.000	80 Unit
09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	44.400.000	1 Unit
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.772.000	4 Unit
09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	3 Unit
2.1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.253.212.894	57,14%

2.1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	293.091.020	1 Laporan
2.1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	393.286.520	2 Laporan
2.1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	129.077.020	1 Laporan
2.1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	148.307.020	1 Laporan
2.1.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	173.209.020	1 Laporan
2.1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	63.153.274	1 Laporan
2.1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	53.089.020	2 Rekomendasi
2.1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.103.393.770	50 %
2.1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	237.372.120	1 Dokumen
2.1.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	186.218.000	1 Dokumen
2.1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	171.642.000	1 Dokumen
2.1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	162.068.000	1 Dokumen
2.1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	185.787.650	1 Dokumen
2.1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	160.306.000	1 Dokumen
2.1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.915.068.670	53,08%
2.1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	196.306.590	1 Dokumen

2.1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	171.178.134	1 Dokumen
2.1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	135.400.412	1 Dokumen
2.1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	212.615.877	1 Dokumen
2.1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	273.000.020	1 Dokumen
2.1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	153.351.619	1 Dokumen
2.1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	736.328.302	2 Dokumen
2.1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	144.151.506	1 Dokumen
2.1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	211.391.805	1 Dokumen
2.1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	209.087.835	1 Dokumen
2.1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.611.820	1 Dokumen
2.1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	191.571.920	1 Dokumen
2.1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	83.072.830	1 Dokumen
2.1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2.194.681.669	53 %
2.1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	813.569.328	7 Dokumen
2.1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	190.966.044	1 Laporan
2.1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	897.995.959	3 Laporan
2.1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	197.678.020	3 Laporan
2.1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	94.472.318	1 Laporan

Dalam pencapaian target-target tersebut, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2025 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:
(mengikuti Program yang ada pada SIPD Penatausahaan sekarang)

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 365.247.312,- pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 99.180.000,- atau 27,15%. Hal ini efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 287.764.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.820.000,- atau 31,91%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (01.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.799.828,- dan terealisasi sebesar Rp. 585.000,- atau 12,19%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(01.03)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.799.828,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.950.000,- atau 40,63%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran - pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD(01.04)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.941.828,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.665.000,- atau 67,61%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD(01.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.941.828,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.06)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.192.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.160.000,- atau 4,06% efisiensi hal ini disebabkan karena terdapa Honor Narasumber dan lain-lain tidak dapat dibayarkan karena merupakan Tupoksi dari Balitbangda Prov. Kaltim.

- ***Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(01.07)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.808.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

• ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (02)***

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 13.667.569.862,- pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.13.371.426.092,- atau 97,83%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024. ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (02.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.415.336.438,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.134.287.092,- atau 97,91%. hal ini disebabkan Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024. ***Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (02.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 242.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 235.200.000,- atau 97,17%. hal ini disebabkan Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (02.03)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 723.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (02.04)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 579.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (02.06)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.894.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (02.07)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.996.924,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.939.000,- atau 38,80%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

• **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (03)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 8.710.000,- pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.3.588.000,- atau 41,19%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (03.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.794.000,- atau 69%. hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (03.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.794.000,- atau 69%. hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025

- ***Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (03.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (03.06)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (05)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 113.180.000,- pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.60.806.924,- atau 53,73%. Hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- ***Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (05.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.866.000,- atau 79,30%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (05.09)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.940.924,- atau 57,71%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (05.11)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah (06)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.048.213.151,- pada Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.948.489.819,- atau 95,13%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (06.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.528.741,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.879.200,- atau 98,44%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (06.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 767.100.088,- dan terealisasi sebesar Rp. 756.208.680,- atau 98,59%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (06.03)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.122.881,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.031.000,- atau 88,77%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyediaan Bahan Logistik Kantor (06.04)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 81.080.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.212.714,- atau 98,93%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (06.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.333.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.882.500,- atau 37,01%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Fasilitasi Kunjungan Tamu (06.08)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.302.000,- atau 61,30%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (06.09)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 934.647.191,- dan terealisasi sebesar Rp. 928.573.725,- atau 99,35%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (06.10)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.400.000,- atau 45,86%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (07)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 54.749.714,- pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 50.893.500,- atau 92,96%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Pengadaan Mebel (07.05)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 52.143.840,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.893.500,- atau 97,60%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (07.06)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.874,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (07.09)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (08)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 3.412.803.369,- pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 3.040.391.308,- atau 89,01%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyediaan Jasa Surat Menyurat (08.01)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%.

- ***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (08.02)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 561.629.205,- dan terealisasi sebesar Rp. 393.119.348,- atau 70%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (08.03)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 390.412.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 230.494.200,- atau 59,04%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (08.04)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.445.761.364,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.401.777.760,- atau 98,20%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (09)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 688.366.998,- pada Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 633.105.851,- atau 91,97%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (09.01)*

- Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 152.087.998,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.478.278,- atau 84,47%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (09.02)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 198.655.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.481.225,- atau 85,82%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (09.06)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.302.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.227.252,- atau 97,82%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (09.08)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 44.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.901.500,- atau 96,62%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (09.09)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 233.772.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.917.596,- atau 99,64%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (09.10)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.100.000,- atau 99,51%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (2.1.01)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.253.212.894,- pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.042.477.331,- atau 83,18%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi(2.1.01.1)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 293.091.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.283.200,- atau 77,21%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum (2.1.01.2)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 393.286.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 330.283.200,- atau 84,02%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (2.1.01.4)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 129.077.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.899.177,- atau 94,44%. hal ini efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (2.1.01.5)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.307.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.029.200,- atau 82,96%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (2.1.01.11)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 173.209.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 171.665.400,- atau 99,11%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (2.1.01.12)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.153.274,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.760.900,- atau 78,79%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan (2.1.01.13)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.089.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.381.200,- atau 36,51%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• ***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (2.1.02)***

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.1.103.393.770,- pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.077.748.280,- atau 97,68%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (2.1.02.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 237.372.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 227.341.102,- atau 95,78%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (2.1.02.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 186.218.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 184.197.430,- atau 98,92%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (2.1.02.3)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 171.642.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.521.200,- atau 97,60%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2.1.02.6)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 162.068.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 157.615.400,- atau 97,25%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (2.1.02.9)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 185.787.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.698.384,- atau 98,34%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (2.1.02.10)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.306.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 158.374.764,- atau 98,80%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (2.1.03)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.915.068.670,- pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.251.786.673,- atau 77,25%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2.1.03.1)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 196.306.590,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.302.000,- atau 90,83%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (2.1.03.2)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 171.178.134,- dan terealisasi sebesar Rp. 162.039.086,- atau 94,67%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (2.1.03.3)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135.400.412,- dan terealisasi sebesar Rp. 130.371.200,- atau 96,29%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembang Pertanian, Perkebunan dan Pangan (2.1.03.4)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 212.615.877,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.575.474,- atau 85,87%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (2.1.03.5)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 273.000.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.547.493,- atau 98,37%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.1.03.6)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 153.351.619,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.610.270,- atau 82,56%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (2.1.03.7)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 736.328.302,- dan terealisasi sebesar Rp. 322.575.800,- atau 43,81%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (2.1.03.8)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 144.151.506,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.750.720,- atau 85,85%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (2.1.03.9)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 211.391.805,- dan terealisasi sebesar Rp. 190.631.480,- atau 90,18%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembang Perhubungan (2.1.03.10)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 209.087.835,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.740.000,- atau 87,40%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman***

(2.1.03.11)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.611.820,- dan terealisasi sebesar Rp. 142.186.900,- atau 71,95%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembang Penataan Ruang dan Pertanahan (2.1.03.12)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 191.571.920,- dan terealisasi sebesar Rp. 166.233.250,- atau 86,78%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (2.1.03.13)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 83.072.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.223.000,- atau 90,56%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

• Pengembangan Inovasi dan Teknologi (2.1.04)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.194.681.669,- pada Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.546.929.023,- atau 70,48%. Hal ini disebabkan karena dilakukannya pergeseran yang menyebabkan perubahan karena kendala waktu pelaksanaan kegiatan

- Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi(2.1.04.1)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 813.569.328,- dan terealisasi sebesar Rp. 570.257.117,- atau 70,10%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangunan/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (2.1.04.2)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 190.966.044,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.662.320,- atau 80,99%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah yang Bersifat Inovatif (2.1.04.3)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 897.995.959,- dan terealisasi sebesar Rp. 672.869.628,- atau 74,93%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (2.1.04.4)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.678.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.382.798,- atau 34,09%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- ***Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2.1.04.5)***

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 94.472.318,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.757.160,- atau 86,54%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).
- SIPD yang sering mengalami kendala

BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial

- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Defenisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- Defenisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain

4.4.2.5 Aset

- **Defenisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya,

penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut

diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:

- a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
 - Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Uang Muka
Panjar Kegiatan
Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Beban Jasa Dibayar Dimuka
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis
Persediaan Bahan/Material
Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- **Defenisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ **KEWAJIBAN**

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

▪ **EKUITAS**

- EKUITAS
- Surplus/Defisit-LO
- Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akual. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2025.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan pada BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 tidak memiliki Pendapatan dikarenakan dengan berlakunya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada tahun 2018 kegiatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi diberhentikan sampai dengan terbitnya kebijakan dari peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait eksistensi Balitbangda Prov. Kaltim.

5.1.2 Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp **27.825.197.409,-** terealisasi sebesar Rp. **25.126.822.801** atau sebesar 90,30%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan

pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Table 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025		31 Desember 2024
	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100
BELANJA	27.825.197.409,00	25.126.822.801,00	90,30
<i>BELANJA OPERASI</i>	27.043.220.375,00	24.358.691.621,00	90,07
Belanja Pegawai	13.415.336.438,00	13.134.287.092,00	97,91
Belanja Barang dan Jasa	13.627.883.937,00	11.224.404.529,00	82,36
Belanja Hibah			
Belanja Bantuan Sosial			
<i>BELANJA MODAL</i>	781.977.034,00	768.131.180,00	98,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	781.977.034,00	768.131.180,00	98,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase realisasi terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 96,94%. Dari target sebesar Rp. 27.043.220.375,- terealisasi sebesar Rp 24.358.691.621,- atau 90,07%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut.

Table 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)
<i>Belanja Operasi</i>	27.043.220.375,00	24.358.691.621,00	90,07
Belanja Pegawai	13.415.336.438,00	13.134.287.092,00	97,91
Belanja Barang dan Jasa	13.627.883.937,00	11.224.404.529,00	82,36

▪ Belanja Pegawai

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp**13.415.336.438,-** untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp**13.134.287.092,-** atau sebesar 97,91%.

Table 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025		31 Desember 2024
	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100
Belanja Pegawai	13.415.336.438,00	13.134.287.092,00	97.91
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.396.424.032,00	4.273.315.425,00	97,20
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.018.912.406,00	8.860.971.667,00	98,25
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta			

KDH/WKDH				
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan				
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah				

Tersisnya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 281.049.346,- atau sebesar 3,09% disebabkan Karena Adanya Perpindahan Pegawai .

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda).

Table 6 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025		31 Desember 2024
	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100
Belanja Barang dan Jasa	13.627.883.937,00	11.224.404.529,00	82,36
Belanja Barang	1.878.164.718,00	1.299.256.868,00	69,18
Belanja Barang Pakai Habis	1.878.164.718,00	1.299.256.868,00	69,18
Belanja Jasa	8.024.879.469,00	6.546.152.364,00	81,57
Belanja Jasa Kantor	6.140.960.605,00	5.081.144.744,00	82,74
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	70.916.964,00	66.581.760,00	93,89
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	380.966.400,00	224.674.200,00	58,97
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.295.690.500,00	1.089.957.336,00	84,12
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	123.090.000,00	70.540.924,00	57,31

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	13.255.000,00	13.253.400,00	99,99	18.804.750.00
Belanja Pemeliharaan	533.911.000,00	518.023.534,00	98.68	527.906.115.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.339.000,00	199.191.938,00	94,25	186.293.115.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	233.772.000,00	232.917.596,00	99,63	341.613.000.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	88.800.000,00	85.914.000,00	96,75	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.155.316.250,00	2.825.359.263,00	85.29	5.635.831.756.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.862.270.000,00	2.825.359.263,00	98,71	5.635.831.756.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	293.046.250,00	0.00	0.00	0.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.612.500,00	35.612.500,00	100.00	29.700.000.00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.612.500,00	35.612.500,00	100.00	29.700.000.00

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.403.479.408,- atau sebesar 17,64% disebabkan oleh karena adanya efisiensi dari kegiatan tahun 2025.

5.1.2.2 Belanja Modal

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 781.977.034,-. untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp. 768.131.180,00,- atau sebesar 98,23%.

Table 7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2024		31 Desember 2023
	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100
BELANJA MODAL	781.977.034,00	768.131.180,00	98,23

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	781.977.034,00	768.131.180,00	98,23	1.611.419.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	729.050.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	729.050.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	34.549.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	34.549.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	105.374.379,00	96.926.780,00	91,98	665.671.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	8.646.669,00	6.741.500,00	77,97	14.500.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	96.727.710,00	90.185.280,00	93,24	651.171.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	191.117.852,00	188.590.000,00	98,68	10.050.000,00
Belanja Modal Alat Studio	191.117.852,00	188.590.000,00	98,68	10.050.000,00
Belanja Modal Komputer	485.484.803,00	482.614.400,00	99,41	172.099.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	454.868.621,00	451.999.400,00	99,37	148.156.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	30.616.182,00	30.615.000,00	100,00	23.943.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	88.369.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	88.369.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	88.369.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Anggaran Belanja modal sebesar Rp. **781.977.034,-** dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Unit Komputer dan Laptop
- Unit Printer
- Peralatan Workshop
- Kursi Kerja
- AC
- Smart TV

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp13.845.854,- atau sebesar 7,77% disebabkan oleh karena adanya efisiensi dari kegiatan tahun 2025.

5.1.3 Pendapatan LO

Pada tahun 2025 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pendapatan LO.

5.1.4 Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2025 sebesar Rp24.404.329.270,-. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp25.756.171.480,11,- maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.351.842.210,11,- Atau 5,25%. Rincian Beban LO tahun 2025 komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Table 8 Realisasi Beban LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
BEBAN	24.404.329.270,00	25.756.171.480,11	(1.351.842.210,11)	(5,25)
BEBAN OPERASI	24.368.831.670,00	24.728.149.908,00	(359.318.238,00)	(1,45)
Beban Pegawai	13.134.287.092,00	11.265.334.267,00	1.868.952.825,00	16,59
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.273.315.425,00	3.296.554.267,00	976.761.158,00	29,63
Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.860.971.667,00	7.699.740.000,00	1.161.231.667,00	15,08
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	269.040.000,00	(269.040.000,00)	100,00
Beban Barang dan Jasa	11.234.544.578,00	13.462.815.641,00	(2.228.271.063,00)	(16,55)
Beban Barang	1.299.256.868,00	2.095.734.984,00	(796.478.116,00)	(38,00)
Beban Jasa	6.556.292.413,00	5.173.642.786,00	1.382.649.627,00	26,72
Beban Pemeliharaan	518.023.534,00	527.906.115,00	(9.882.581,00)	(1,87)
Beban Perjalanan Dinas	2.825.359.263,00	5.635.831.756,00	(2.810.472.493,00)	(49,87)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.612.500,00	29.700.000,00	5.912.500,00	19,91
JUMLAH BEBAN OPERASI	24.368.831.670,00	24.728.149.908,00	(359.318.238,00)	(1,45)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.497.600,00	1.028.021.572,11	(1.028.021.572,11)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	898.177.172,31	(898.177.172,31)	(100,00)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	94.016.799,80	(94.646.206,00)	(100)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.497.600,00	35.827.600,00	(330.000,00)	(0,92)

5.1.4.1 Beban Operasi

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menanggung beban operasi sebesar **Rp24.368.831.670,-** Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar **Rp24.728.149.908,-**, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar **Rp359.318.238,-** Atau **1,45%**. Rincian Beban Operasi tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp. 1.868.952.825,00,- atau sebesar 16,59%.

5.1.4.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi Penurunan sebesar Rp. 2.228.271.063,- atau sebesar 16,55%, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan.

5.1.4.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 maka terjadi Penurunan sebesar Rp992.523.972,11,- atau sebesar 96,55%, hal ini disebabkan karena adanya Penyusutan ATB selama periode 1 Tahun

5.1.5 Aset

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp20.589.952.469,56,- pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp19.976.031.389,56,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 613.921.080,- atau 3,07%. Rincian pendapatan aset tahun 2024 beserta komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Table 9 Perbandingan Aset Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset			
Aset Lancar			
- Kas di Bendahara Penerimaan			
- Kas di Bendahara Pengeluaran			
- Kas di BLUD			
- Kas Lainnya			
- Piutang Pajak			
- Piutang Bukan Pajak			
- Piutang Retribusi			
- Piutang Lainnya			
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
- Persediaan	0	0	0
- Belanja dibayar dimuka			
Aset Non lancar			
- Investasi Jangka Panjang	0	0	
- Aset Tetap	19.668.312.402,89	19.018.893.722,89	3,41
- Aset Lainnya	921.640.066,67	957.137.666,67	3,71

5.1.5.1 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aset lancar bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,- maka dapat diketahui tidak ada kenaikan dan penurunan sebesar Rp. 0,- Atau 0%. Hal ini dikarenakan persediaan habis terpakai.

5.1.5.1.1 Persediaan

Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- bila dibandingkan dengan Persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0, maka dapat diketahui tidak terdapat Penurunan/Kenaikan sebesar Rp. 0,- Atau 0%. Hal ini dikarenakan Maksimal penggunaan terhadap persediaan.

5.1.5.2 Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp20.589.952.469,56,-. Bila di bandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 19.976.031.389,56,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 613.921.080,- Atau 3,07%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2025 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp. **19.668.312.402,89,-** Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. **19.018.893.722,89,-**, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar

Rp.649.418.680,- Atau 3,41%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Table 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2025

Uraian	2024	Bertambah	Berkurang	2025	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap					
Tanah	11.745.762.000	0	0	11.745.762.000	100
Peralatan dan Mesin	12.920.981.254	768.131.180	(118.712.500)	13.570.399.934	5
Gedung dan Bangunan	4.700.839.990	0	0	4.700.839.990	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	
Aset Tetap Lainnya	235.133.000	0	0	235.133.000	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	256.085.560	0	0	256.085.560	0
Akumulasi Penyusutan	(10.839.908.081,11)			(10.839.908.081,11)	0

5.1.5.2.1.1 Tanah

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 memiliki Tanah sebesar Rp. 11.745.762.000,- Bila dibandingkan dengan tanah tahun lalu yaitu sebesar Rp. 11.745.762.000,- Atau 0%. maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan Tanah selama tahun anggaran 2024.

5.1.5.2.1.2 Peralatan dan Mesin

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp **13.570.399.934,-** Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp. **12.920.981.254**, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 649.418.680,- Atau 5,03%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

Belanja Modal : Rp. 768.131.180,-
 Hibah : Rp. 0
 Reklasifikasi dari : Rp. 0
 Revaluasi : Rp. 0

Pengurangan

Rusak Berat	: Rp. 67.819.000,-
Mutasi	: Rp. 0
BM Menjadi Aset Tetap	: Rp. 0
Nilai dibawah Kapitalisasi:	Rp. 50.893.500,-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

5.1.5.2.1.3 Gedung dan Bangunan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp 4.700.839.990,- Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.700.839.990,-, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

5.1.5.2.1.5 Aset Tetap Lainnya

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 235.133.000,-. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 235.133.000,-, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran 2025.

5.1.5.2.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 256.085.560,-. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 256.085.560,-, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun anggaran 2025.

5.1.5.2.1.7 Akumulasi Penyusutan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomis aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2025 akumulasi penyusutan atas aset tetap Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5.1.5.2.2 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2025 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp 921.640.066,67,-. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 957.137.666,67,-, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 35.497.600 Atau 3,71%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat dikarenakan penambahan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025.

5.1.6 Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp. 35.652.928,- per 31 Desember

2025. Pada akhir tahun 2025 terdapat kewajiban sebesar Rp. 35.652.928,-. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 25.485.879, maka dapat diketahui terdapat Kenaikan sebesar Rp. 10.167.049,- atau 39,89%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.3 Utang Belanja

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2025 terdapat Utang beban sebesar Rp. 35.652.928,-. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 25.485.879,-, maka dapat diketahui terdapat Kenaikan sebesar Rp. 10.167.049,- atau 39,89%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya Pergantian dalam penggunaan Internet Kantor.

5.1.7 Ekuitas

Kekayaan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **20.554.299.541,56,-** Nilai ini secara matematikatis merupakan selih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2025 terdapat ekuitas sebesar Rp. **20.554.299.541,56,-** Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp. **19.950.545.510,56,-**, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 603.754.031,- atau 3,03%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya belanja modal tahun 2025.

BAB VI

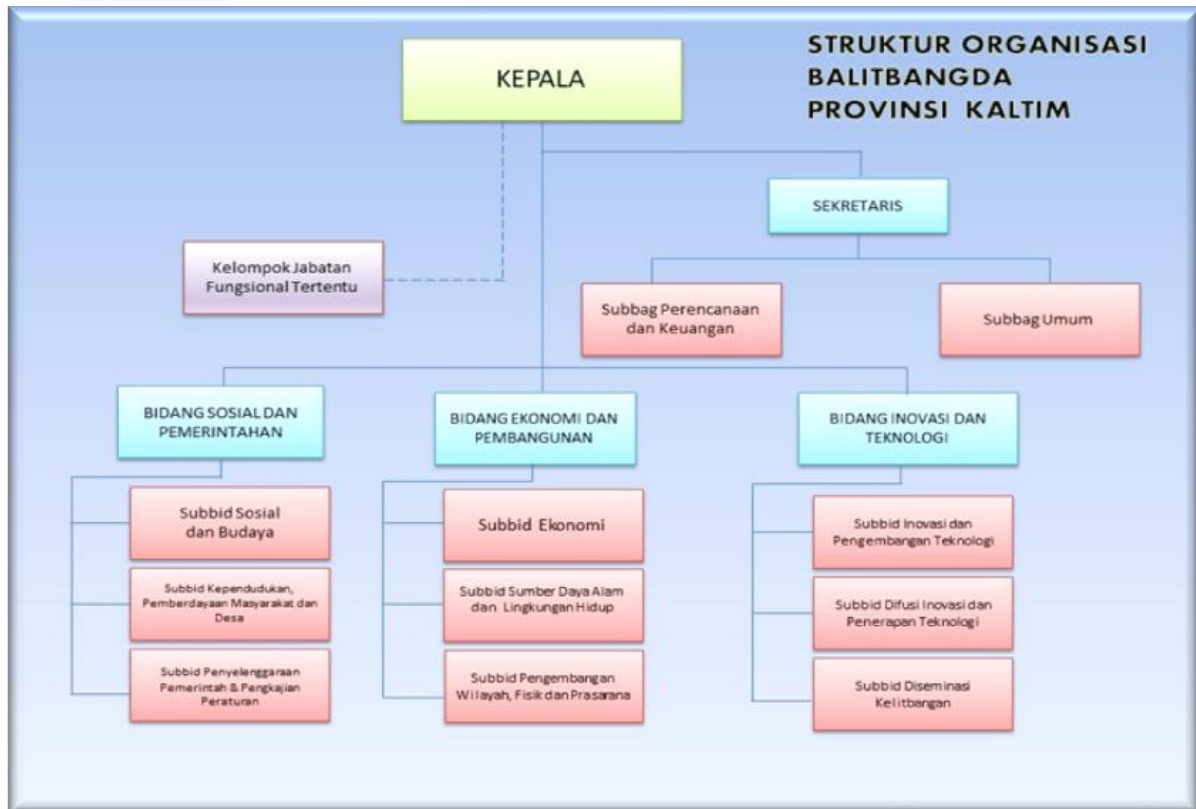
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Mt. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih kabupaten/kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan.

Pada tahun 2021 Balitbangda tidak memiliki Pendapatan dikarenakan dengan berlakunya Permendagri Nomor :12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada tahun 2018 kegiatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi **diberhentikan** sampai dengan terbitnya kebijakan dari peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait eksistensi UPTB-BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim, capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi beroperasi sampai akhir bulan Juni Tahun 2018.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

➤ Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang menjadi tanggungjawab Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dibidang penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan pembangunan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya

yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Table 11 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2025

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala		1				
Kepala Bidang		4				
Kepala Sub Bidang		1	4			
Peneliti	2	12	1			
Staf		1	2		3	12
Jumlah						

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan danantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 30 Januari 2026
Kepala BALITBANGDA Provinsi
Kalimantan Timur ,



Dr. M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Tingkat Utama Muda
NIP. 19731127 200604 1 009

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2025
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2025 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Kematian tahun 2025
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2025 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2025
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2025 yang ditagih / dibayar tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2025 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2025 dengan tanggal cetak diatas 31 desember 2025 dengan Validasi Bank

Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2025 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2025 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2025 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXVII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXVIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2025 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)